



LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN SEPTEMBER 2018

Pendahuluan

Komnas HAM merupakan lembaga pelayanan publik yang menjadi tempat permintaan perlindungan yang terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Koorporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 sampai dengan 30 September 2018, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 351 berkas.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kategori Berkas

Kategori Berkas Kasus										Total
Berkas Kasus Baru 1x					Berkas Lanjutan					
PMT	MDS	Tim	File	Perwakilan	PMT	MDS	Tim	File	Perwakilan	
41	14		73	7	106	39		37	34	351

2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	14	20	Kalimantan Barat	
2	Sumatera Utara	30	21	Kalimantan Selatan	1
3	Bengkulu	3	22	Kalimantan Tengah	4
4	Jambi	7	23	Kalimantan Timur	8
5	Riau	4	24	Kalimantan Utara	1
6	Sumatera Barat	12	25	Gorontalo	
7	Sumatera Selatan	18	26	Sulawesi Selatan	7
8	Lampung	4	27	Sulawesi Tenggara	6
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	28	Sulawesi Tengah	11
10	Kepulauan Riau	2	29	Sulawesi Utara	4
11	Banten	8	30	Sulawesi Barat	
12	Jawa Barat	25	31	Sulawesi Selatan Barat	
13	DKI Jakarta	73	32	Maluku	23
14	Jawa Tengah	17	33	Maluku Utara	1
15	Jawa Timur	26	34	Papua	3
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	6	35	Papua Barat	
17	Bali	5	36	Tanpa Alamat	11
18	Nusa Tenggara Barat	2			
19	Nusa Tenggara Timur	12		Jumlah	351

3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Pemantauan dan penyelidikan	183
2	Mediasi	58
3	Tim	
4	File	110
Jumlah		351

4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	193
2	Tembusan	154
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	4
Jumlah		351

5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	82
2	Pos	248
3	Fax	1
4	Email	8
5	Online	2
6	Audiensi	3
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	7
8	Jejaring Pengaduan	
Jumlah		351

6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	14
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
3	Hak mengembangkan diri	4
4	Hak memperoleh keadilan	107
5	Hak atas kebebasan pribadi	5
6	Hak atas rasa aman	26
7	Hak atas kesejahteraan	144
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	6
9	Hak perempuan	2
10	Hak anak	
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	
12	Non HAM	43
Jumlah		351

6.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	8
Lingkungan hidup	6
	14
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
	0

III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	4
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	0
	4
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	77
Kesewenang-wenangan proses hukum di Kejaksaan	2
Kesewenang-wenangan proses hukum di pengadilan	27
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	1
	107
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	1
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	3
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	
Berkumpul, berapat, dan berserikat	
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	
Menyampaikan pendapat di muka umum	
Status kewarganegaraan	
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	1
	5
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suaka	1
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	3
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	7
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	4
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	9
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	2
	26

VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	4
Hak atas kepemilikan tanah	65
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	32
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	13
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	26
Hak atas kesehatan	4
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	
	144
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	1
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	4
	6
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	
Hak atas kesetaraan dengan suami	2
	2
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	0
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	
	0
XII. Non HAM	Jumlah berkas
Non Ham	43
Jumlah Seluruh	351

7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (kementrian)	1
2	Korporasi	2
3	Lembaga pendidikan	1
4	Individu - Orang seorang	159
5	Individu - Anak	8
6	Individu - Perempuan	9
7	Individu - Pekerja/Profesi	23
8	Individu - Ras dan etnis	1
9	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
10	Individu - Narapidana	2
11	Kelompok - Masyarakat	87
12	Kelompok - Pekerja	12
13	Kelompok - Masyarakat Adat	6
14	Kelompok - Ras dan Etnis	1
15	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	1
16	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
17	Organisasi	1
18	Warga Negara Asing (WNA)	2
19	Tanpa Keterangan Pihak Korban	33

8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah Berkas
1	Pemerintah pusat (kementrian)	28
2	Pemerintah daerah	42
3	Lembaga legislatif	
4	Lembaga negara (non kementerian)	4
5	Lembaga peradilan	25
6	POLRI	93
7	TNI	6
8	Kejaksaan	4
9	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	2
10	Pemerintah negara lain	2
11	Korporasi	67
12	BUMN/BUMD	16
13	Lembaga pelayanan kesehatan	2
14	Lembaga pendidikan	7
15	Individu - Orang seorang	5

16	Individu - Pekerja/Profesi	5
17	Kelompok - Masyarakat	2
18	Kelompok - Pekerja	1
19	Organisasi	4
20	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	36

Jakarta, 1 Oktober 2018

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim